

## ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, BELANJA MODAL & SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT

**M. Reza Syahpura**  
[m.reza624422@gmail.com](mailto:m.reza624422@gmail.com)  
**Rosyadi**  
**Yarlina Yacoub**

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of education as reflected by the mean years of schooling, government spending as reflected by capital expenditure, and the effectiveness of local government budgets planning as reflected by SiLPA on economic growth in districts/cities of West Kalimantan. Using a panel data regression approach to 14 districts/cities during 2016-2021, it was found that: (1) education level had a negative and significant effect on economic growth; (2) capital expenditure has a positive and significant effect on economic growth; (3) SiLPA has a positive and insignificant effect on economic growth. Based on the simultaneous test, all of the dependent variables above have a significant effect on the economic growth of districts/cities in West Kalimantan.*

**Keywords: Education Level; Capital Expenditures; SiLPA; Economic growth**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan yang direfleksikan rata-rata lama sekolah, pengeluaran pemerintah yang direfleksikan oleh belanja modal, dan efektivitas perencanaan anggaran pemerintah daerah yang direfleksikan oleh SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Menggunakan pendekatan regresi data panel terhadap 14 wilayah kabupaten/kota selama periode 2016-2021, ditemukan bahwa : (1) tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (2) belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; (3) SiLPA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uji simultan, seluruh variabel dependen diatas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

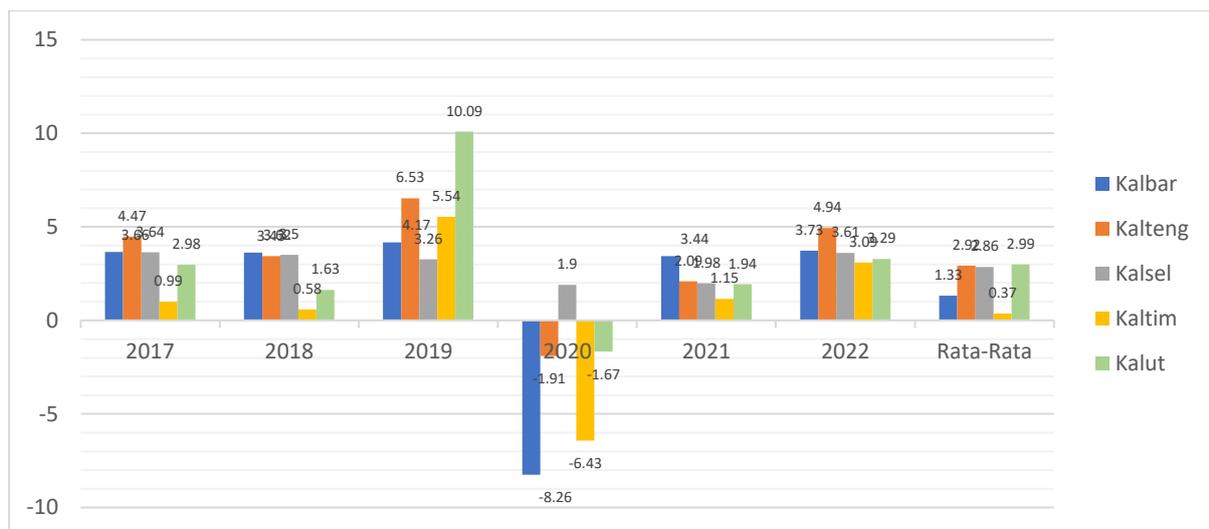
**Kata kunci: Tingkat Pendidikan; Belanja Modal; SiLPA; Pertumbuhan Ekonomi**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan guna memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin dari penduduk yang sejahtera dalam kualitas kehidupan sosial dan ekonominya. Proses pembangunan ekonomi bersifat multidimensional, di dalamnya terdapat berbagai transformasi mendasar dari

struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan negara, selain mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006). Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan konsep pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam paradigma lama lebih mengharapkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan dapat terpecahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau yang sering dikenal dengan konsep “dampak merembes kebawah” atau Trickle Down Effect (Kuncoro. 2006). Sehingga dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, diharapkan dapat mempermudah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengurangnya kemiskinan di negara tersebut.

Salah satu wilayah yang memiliki letak strategis serta sumberdaya alam yang melimpah ialah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Letak wilayah yang merupakan daerah sentral Indonesia menjadikan provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan memiliki daya dukung geografis yang baik. Selain itu, sumberdaya alam yang melimpah juga mendukung potensi pembangunan di Pulau Kalimantan. Walaupun didukung dengan hal-hal tersebut, masih ditemukan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar provinsi ini.



Sumber. BPS Pusat (2023)

**Gambar 1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan, Tahun 2017-2022**

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Barat yang masih mencatat nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah nasional dan berada pada peringkat 2 terbawah diantara provinsi lainnya di Kalimantan. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis dan ditelusuri faktor apa saja yang dapat mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Karena, pada Provinsi Kalimantan Timur walaupun merupakan pertumbuhan paling rendah namun merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar di Indonesia, yakni berada pada peringkat ke 7 PDRB terbesar di Indonesia. Lain halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat yang maish berada pada peringkat ke 17 PDRB terbesar di Indonesia, merupakan wilayah yang diharapkan masih dapat tumbuh dengan cepat.

Angka pertumbuhan ekonomi merefleksikan besaran perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) secara relatif dalam persentase (%), dimana PDB juga dapat dinyatakan sebagai gambaran permintaan agregat penduduk. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mendorong peningkatan permintaan dan penambahan jumlah output yang diproduksi perekonomian. Sehingga, faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan penting untuk diketahui dan dianalisis, karena sangat berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan bagi daerahnya.

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang, maka diharapkan semakin besar kontribusi yang dapat diberikan terhadap perekonomian melalui pengetahuan dan keahlian yang dipelajarinya di jenjang pendidikan tinggi. Tenaga yang menamatkan pendidikan lebih tinggi terbukti dapat lebih memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui pendidikan tinggi yang telah ditamatkannya (Jones, (2001); Lemieux (2014); & Dutta (2006)). Semakin tinggi tingkat pendidikan atau lama sekolah yang ditamatkan oleh masyarakat pada suatu daerah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhannya. Karna, diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan sejalan dengan

peningkatan produktivitas masyarakat. Berdasarkan penelitian terdahulu, Laverde-Rojas et al (2019) dan Syamsuddin et al (2021) menemukan bahwa RLS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Raynaldi (2016) menemukan bahwa RLS berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah tenaga kerja yang terdidik pada tahun 2022 berjumlah 237.826 jiwa atau 9,58% dari total tenaga kerja. Hal ini disebabkan mayoritas tenaga kerja di Kalimantan Barat merupakan tamatan SMA (26,12%) dan SMP (25,92%). Tingkat pendidikan yang diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) di Kalimantan Barat adalah sebesar 7,59 atau dapat dinyatakan rata-rata pendidikan yang berhasil ditamatkan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah Sekolah Dasar (SD). Hal ini membuktikan masih rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik di Provinsi Kalimantan Barat. Makin banyaknya tenaga kerja terdidik ini diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dalam mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Barat, yang dilihat dari peningkatan output yang dihasilkan atau terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara bentuk intervensi dan regulasi pemerintah dalam menjalankan pembangunan ekonomi daerah ialah dengan mengimplementasikan kebijakan berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu instrumen kebijakan APBD yang dapat dilakukan pemerintah daerah ialah melalui belanja yang diharapkan dapat melibatkan langsung masyarakat sebagai tenaga kerja. Belanja modal adalah satu dari sekian banyak belanja yang langsung dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat, disamping itu belanja modal juga akan menciptakan aset pemerintah yang dapat mendukung operasional guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan setiap tahunnya, hal ini terlihat dari besaran anggaran untuk belanja modal pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Ini menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja modal tersebut diharapkan pendapatan masyarakat juga meningkat melalui penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Terbukti bahwa pengeluaran

pemerintah berupa belanja modal dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Kuntari et al, (2019); Badrudin dan Kuncorojati (2017)).

Di Provinsi Kalimantan Barat, belanja modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1,25 trilyun. Belanja ini merupakan pos belanja terbesar ketiga setelah belanja barang dan jasa (belanja langsung) dan belanja pegawai (belanja tidak langsung) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2022. Tingginya belanja modal yang digelontorkan pemerintah daerah ini diharapkan juga dapat mampu mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Sehingga, diduga belanja modal yang merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan SiLPA merupakan selisih antara surplus atau desifist anggaran dengan pembiayaan netto suatu daerah. Dalam menyusun APBD, SiLPA idealnya bernilai nol, yang berarti penerimaan pembiayaan harus dapat menutup desifit anggaran yang terjadi. Positif/surplus atau negatif/defisit SiLPA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baiknya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Ratna, 2015).

Di Indonesia sering terjadinya SiLPA dalam APBD pemerintah daerah yang menyebabkan anggaran tidak terserap dengan baik. SiLPA surplus atau positif seharusnya dapat dialokasikan guna menunjang program-program kebijakan pembangunan daerah (DJPK Kemenkeu, 2023). Sehingga dapat diprediksi bahwa semakin tinggi sisa pembiayaan anggaran akan menurunkan pertumbuhan karena diduga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak terserap dengan baik untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, Pinem et al (2020) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Sari et al (2018) dan Novandy (2015) menemukan SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat merupakan paling rendah kedua diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, setelah Provinsi Kalimantan Timur yang telah

maju. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang yang mengantar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan tersebut adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat sebagai faktor tenaga kerja, belanja modal yang dikeluarkan pemerintah sebagai kebijakan percepatan pembangunan dan efektivitas perencanaan atau penyerapan anggaran berupa SiLPA.

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Sukirno (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai berkembangnya aktivitas-aktivitas perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan dapat menjadi indikator yang sering dipergunakan dalam menenilai berhasil atau tidaknya pembangunan, hal ini cukup beralasan karena pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Jhingan (2014) menjelaskan tiga komponen dasar yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pasokan barang yang terus meningkat, kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan untuk menghasilkan pengetahuan melalui inovasi yang berguna pada waktu yang tepat.

Bergeser pada teori Harrod-Domar, mereka menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi hanya pada saat pengeluaran agregat melalui investasi mengalami pertambahan yang berkelanjutan pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Sehingga, Harrod-Domar menitikberatkan pada konsep investasi yang dapat meningkatkan pengeluaran agregat-permintaan agregat, yang akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dilakukan dapat melalui investasi swasta dalam bentuk modal dalam negeri maupun modal asing, serta investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam iklim investasi dengan kebijakan anggaran belanjanya yang dapat berdampak pada pembangunan ekonomi. Sehingga

kebijakan pemerintah berupa belanja dapat dinyatakan memiliki efek terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi.

Terakhir mengacu pada teori Keynes yang mengemukakan gagasan mengenai siklus arus uang, menitikberatkan konsep mengenai peningkatan konsumsi dalam perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan mendorong lebih meningkatnya belanja dan pendapatan secara berkelanjutan. Keynes mengembangkan model makro ekonomi, dimana ia menyatakan bahwa pertumbuhan akan tercipta oleh faktor-faktor seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan juga impor (Mankiw, 2006). Sehingga faktor pengeluaran pemerintah berupa belanja yang dilakukan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes mengenai konsep permintaan agregat.

Selain kebijakan fiskal berupa pengeluaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah, bentuk belanja tersebut harus memiliki perencanaan yang baik agar tepat sasaran dan tentunya menghindari anggaran yang tidak terserap. Keynesian menyatakan bahwa defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi pada periode yang akan datang (Mankiw, 2006). Defisit anggaran berarti belanja yang dilakukan oleh pemerintah dibiayai oleh utang, sehingga beban pajak yang berhasil terserap dapat dinyatakan lebih rendah dan akan menyebabkan belanja lebih tinggi dari pendapatan. Meningkatnya pendapatan yang siap dibelanjakan pemerintah dalam bentuk belanja-belanja langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara menyeluruh.

Tenaga kerja merupakan modal bagi roda dalam proses pembangunan. Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus mengalami perubahan disertai dengan proses demografi yang terus berlangsung. Tenaga kerja merupakan kewajiban dengan batas usia minimal 10 tahun tanpa batas maksimal. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi dan saling terkait. Keterkaitan itu mencakup banyak pekerjaan dengan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.

Ada dua teori penting dalam konsep ketenagakerjaan, yaitu teori Lewis (Mulyadi, 2003) yang mengungkapkan bahwa kelebihan pekerja merupakan peluang dan bukan masalah. Kelebihan pekerja di satu sektor akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan output dan penyediaan tenaga kerja di sektor lain. Teori kedua adalah Fei-Ranis dalam (Mulyady, 2003) yang berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan tenaga kerja, sumber daya alam yang tidak dapat dikelola, sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian, banyak perlawanan, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Todaro (2006) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kemampuan dalam menyerap dan menciptakan teknologi guna mengembangkan kapasitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Todaro juga menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghasilan yang diharapkan. Rata-rata lama sekolah merupakan reflektor tingkat pendidikan formal yang berhasil ditamatkan masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat daerah tersebut. Investasi terhadap sumber daya manusia yang merupakan faktor tenaga kerja akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi seperti yang telah dijelaskan diatas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, dapat dinyatakan kemampuan tenaga kerja dalam hal produktivitas diharapkan lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis belanja, organisasi dan fungsinya. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimum yang harus disajikan oleh entitas pelapor. Kemudian jenis belanja disusutkan lagi menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja lain/tak terduga. Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 Tahun 2010, pengeluaran

adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) yang akan mengurangi Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak mendapat pengembalian dari Pemerintah.

Halim (2008) mengemukakan bahwa bahwa Capital Expenditure adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Definisi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah persediaan atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Undang-undang nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk membakar tanah, bangunan dan struktur, peralatan dan aset tidak berwujud. Aset tetap yang dimiliki karena Belanja Modal merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas umum maupun untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah

daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan pembiayaan jangka panjang.

Laverde-Rojas et al (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menggunakan pendekatan struktural equation model (SEM), ditemukan bahwa lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Delgado et al (2013) melakukan penelitian mengenai hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan pendekatan non-parametric local-linear regresi dan non-parametric variabel relevance test, ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Raynaldi (2016) melakukan penelitian mengenai IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), ditemukan bahwa RLS memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Syamsuddin et al (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh TPAK dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Menggunakan pendekatan regresi linier, ditemukan bahwa RLS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Saepudin (2011) melakukan penelitian mengenai pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menggunakan regresi data panel, ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) menyimpulkan bahwa belanja modal dan belanja rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut terjadi karena adanya kebocoran dan penyimpangan, penyelewengan, dan kalung dana anggaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salih (2012), Haryanto (2013) dan Maharani & Isnawati (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian lain, Pratini (2014) menemukan bahwa

belanja modal daerah menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat. Artinya semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula nilai PDRB Pemerintah Daerah tersebut.

Pinem et al (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening di Sumatera Barat. Menggunakan regresi data panel, penelitian menunjukkan hasil bahwa SiLPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sari et al (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan, SiLPA dan PAD terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan metode regresi data panel, ditemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Novandy (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh belanja langsung dan SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Menggunakan regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah

Berdasarkan landasan teori serta kajian empiris yang telah dikaji dan ditelaah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Tingkat Pendidikan (RRLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

**H<sub>2</sub>: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

**H<sub>3</sub>: SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

#### **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian dalam penelitian ini ialah pendekatan asosiatif. Rumusan masalah asosiatif akan mempertanyakan asosiasi antara dua atau lebih variabel yang memiliki hubungan simetris, kausal dan interaktif (timbal balik). Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yaitu berdasarkan gabungan data runtut waktu (time series) dan data silang (cross

section). Untuk runtut waktu digunakan periode tahun 2016 s.d 2021, sedangkan data silang menggunakan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Belanja Modal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pertumbuhan Ekonomi 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Dimana variabel eksogen merupakan variabel bebas yang merupakan sebab-sebab yang dapat mempengaruhi variabel lain dalam model dan variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Variabel ini tidak mempengaruhi variabel lain. Variabel eksogen adalah X1 (Rata-Rata Lama Sekolah), X2 (Belanja Modal) dan X3 (SiLPA). Adapun variabel endogen adalah Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Pertama akan dilakukan pengujian menentukan model regresi data panel terbaik diantara pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Selanjutnya setelah ditentukan pendekatan terbaik akan dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas. Terakhir dilakukan uji hipotesis meliputi uji determinasi (R<sup>2</sup>), uji simultan (Uji F), dan uji parsial (uji t).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Berdasarkan hasil uji pemilihan data panel menggunakan uji chow dan uji hausman, ditemukan bahwa pendekatan fixed effect merupakan pendekatan terbaik dalam mengestimasi model persamaan pada penelitian ini.

**Tabel 1. Uji Normalitas**

Normality Test	Uji Normalitas
----------------	----------------

<b>Jarque-Bera</b>	7,665
<b>Probability</b>	0,076
<b>Keterangan</b>	Normal

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 1. diketahui nilai Probability uji normalitas model adalah = 0,076 , dimana nilai ini lebih besar dari Alpha 0.05 ( $0,076 > 0.05$ ), artinya dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 2. Uji Multikolinieritas**

	<b>X<sub>1</sub></b>	<b>X<sub>2</sub></b>	<b>X<sub>3</sub></b>
<b>X<sub>1</sub></b>	1	0,45	-0,009
<b>X<sub>2</sub></b>	0,45	1	0,083
<b>X<sub>3</sub></b>	-0,009	0,083	1

Sumber. Hasil Pengolahan Data.

Dari Tabel 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai korelasi antar variabel bebas tidak ada yang menyentuh angka 0,8.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

<b>Uji Heterokedastisitas</b>	<b>Model 1</b>
	$X_1 = 0,353^*$
<i>Prob. Resabs Equation</i>	$X_2 = 0,071^*$
	$X_3 = 0,527^*$
<i>Keterangan</i>	Homoskedastisitas

\* = signifikan, lebih besar dari  $\alpha = 0.05$

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 3. dapat diketahui bahwa seluruh nilai Probability seluruh variable independen pada model lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ . Sehingga, dapat diartikan bahwa estimasi model penelitian ini bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil estimasi regresi, maka ditemukan model persamaan regresi ialah sebagai berikut.

**Tabel 4. Uji Estimasi Regresi Data Panel**

Variabel	Koefisien	Prob.
C	-7,107	0,807
Tk Pendidikan (X <sub>1</sub> )	-5,934	0,001
Belanja Modal (X <sub>2</sub> )	1,726	0,049
SiLPA (X <sub>3</sub> )	0,306	0,475
R-squared		0,3222
Adjusted R-squared		0,1603
Uji F		0,026

$$PE_{it} = -7,10 - 5,93 RRLS_{it} + 1,726 BM_{it} + 0,306 SiLPA_{it} + e_t$$

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Nilai Adjusted R-square model adalah sebesar 0,1603. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independent, yakni tingkat pendidikan, belanja modal dan silpa dapat menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 16,03%. Adapun selebihnya, yakni 83,97%, adalah variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini, yang dapat berpengaruh pada kenaikan ataupun penurunan Pertumbuhan Ekonomi.

Tingkat pendidikan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $0,00 < 0,05$ ). Belanja modal secara parsial signifikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ( $0,049 < 0,05$ ). SiLPA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ( $0,475 > 0,05$ ).

Berdasarkan uji F model yakni sebesar 0.026 atau lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$  ( $0.00000 < 0.05$ ), sehingga H1 diterima. Artinya semua variabel independen yakni Tingkat Pendidikan, Belanja Modal dan SiLPA secara simultan atau secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **Pembahasan**

### *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hubungan negatif ini menunjukkan hubungan tidak searah atau pengaruh variabel Belanja Modal terhadap variabel

PDRB, namun signifikan sehingga belum bisa membuktikan hipotesis pertama. Ini berarti bahwa secara perhitungan statistika, tingkat pendidikan memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pertama belum dapat diterima. Nilai koefisien yang memiliki arah negatif sebesar -5,93 berarti jika tingkat pendidikan meningkat sebesar 1 tahun dan variabel bebas lainnya kita asumsikan konstan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi turun sebesar 5,93%, ceteris paribus. Begitu pula sebaliknya, setiap penurunan tingkat pendidikan sebesar 1 tahun akan mengakibatkan naiknya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93%, ceteris paribus.

Secara teoritis, kaum klasik menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting menuju terciptanya pertumbuhan, terutama tenaga kerja yang baik dan berkualitas, dalam artian memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan secara umum, dimana terjadinya ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan pekerjaan yang ada, sehingga ketidaksesuaian tersebut berpengaruh pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Jika dilihat perkembangannya, tingkat pendidikan terus bergerak naik dan mengarah pada trend positif sejalan dengan semakin baik dan berkembang sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengarah pada penurunan tiap tahun, terutama sebagai akibat dari bangkitnya perekonomian pasca pandemi covid-19, sehingga arah kedua variabel saling bertolak belakang.

Selain itu, negatifnya tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan diduga terjadi sebagai akibat dari efisiensi didalam pembangunan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan dunia usaha dalam memanfaatkan produksi yang berorientasi padat modal, dibandingkan padat karya. Dimana, perkembangan ekonomi global yang mengarah pada industrialisasi mendorong kepada arah padat modal yang diasumsikan memiliki modal lebih banyak daripada tenaga kerja yang relatif lebih mahal. Industri padat modal diharapkan oleh

pelaku usaha dapat menekan anggaran dan menghasilkan lebih banyak produksi dengan kualitas tinggi sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan pemborosan anggaran (Djunaidi & Alfitri, 2022). Sehingga dengan semakin berkonsentrasinya kegiatan industri pada padat modal, akan menciptakan gap permintaan tenaga kerja yang menyebabkan tenaga kerja terdidik tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (2023), rata-rata penduduk Kalbar pada terkonsentrasi pada tingkat pendidikan SD/MI sebesar 35,96%, diikuti SLTP/MTs dan SMU/SMK/MA yang masing-masing sebesar 13,63%. Jumlah penduduk dengan status pendidikan Diploma sd Universitas hanya sebesar 6,47%. Hal ini membuktikan bahwa salah satu pendorong bertolak belakangnya pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat pendidikan yang relatif rendah dan umumnya berada pada tingkat sekolah dasar. Sehingga, tingkat pendidikan tersebut kurang mampu menopang proses pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini tidak searah dengan teori klasik Adam Smith tentang tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian sebelumnya oleh Raynaldhi (2016) yang menemukan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hubungan yang signifikan ini menunjukkan hubungan searah atau pengaruh variabel belanja modal terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi cukup bermakna, sehingga membuktikan hipotesis kedua diterima. Ini berarti bahwa secara perhitungan statistika, belanja modal memberikan kontribusi yang nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.

Secara teoritis, positifnya belanja modal mendukung teori Harrod Domar yang menyatakan investasi merupakan kunci dari proses pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali

investasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui belanja modal. Investasi yang dilakukan dapat melalui investasi swasta dalam bentuk modal dalam negeri maupun modal asing, serta investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Selain itu hasil penelitian juga mendukung teori Keynes yang mengembangkan model makro ekonomi, dimana pengeluaran pemerintah (G) memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (Y). Sehingga, belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat diduga telah tepat sasaran dan perlu terus dilakukan, karena terbukti berpengaruh menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sepanjang tahun 2016 hingga 2021 mengalami trend menurun. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran terutama pada tahun-tahun pandemi covid-19, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan penghematan anggaran dan mengalihkan anggaran tersebut dalam penanganan pandemi. Hal ini juga searah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada masa tersebut, yang menunjukkan trend penurunan dan menyebabkan resesi ekonomi. Sehingga terbukti arah hubungan antara pengeluaran belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini searah dengan teori Keynes yang menyatakan pengeluaran pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian sebelumnya oleh Salih (2012); Haryanto (2013); Maharani & Isnawati (2014); Pratini (2014); yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### *Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiLPA memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hubungan yang tidak signifikan ini menunjukkan hubungan pengaruh variabel SiLPA terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak nyata, sehingga membuktikan hipotesis ketiga ditolak. Ini berarti

bahwa secara perhitungan statistika, SiLPA memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Secara teoritis, positifnya koefisien SiLPA belum mendukung teori Keynes, yang menyatakan bahwa bentuk pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki perencanaan yang baik agar tepat sasaran dan menghindari anggaran yang tidak terserap. Keynesian menyatakan bahwa defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi pada periode yang akan datang (Mankiw, 2006). Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa surplus anggaran yang direfleksikan dari SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan, namun tidak signifikan. Artinya, pengaruh ini hampir tidak nyata atau relatif kecil. Sehingga diduga surplus anggaran belum memiliki pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat yang menciptakan pertumbuhan ekonomi.

SiLPA Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa belanja daerah yang tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah daerah, namun bentuk belanja ini masuk kedalam akumulasi SiLPA, seperti belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dsb. Dimana bentuk dana tersebut bukan merupakan wewenang pemerintah daerah untuk dibelanjakan, namun masuk kedalam komponen perhitungan SiLPA. Sehingga dapat dinyatakan bahwa SiLPA belum memadai sebagai reflektor daripada pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Hasil penelitian ini belum searah dengan teori Keynesian mengenai hubungan defisit anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian sebelumnya oleh Sari et al (2018); dan Novandy (2015); yang menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis atas penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : (1) Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini berarti tingkat pendidikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun diduga spesialisasi pendidikan masyarakat belum sepenuhnya terserap lapangan pekerjaan; (2) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini berarti belanja pemerintah berupa belanja modal berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, karena belanja yang dilakukan pemda bersifat tepat sasaran; (3) SiLPA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal ini berarti surplus anggaran memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya relatif kecil atau hampir tidak nyata.

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah guna terus meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang semakin tinggi tingkat pendidikannya dapat terserap sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Sehingga, dengan terjadinya spesialisasi akan semakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memposisikan belanja daerah, khususnya belanja modal yang terbukti memiliki pengaruh signifikan, dimana pemda perlu mengalokasikan belanja modal yang tepat sasaran sehingga dapat berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, kegunaan maupun komposisinya; (3) Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kebijakan perencanaan yang baik, sehingga dapat menghindari SiLPA yang tinggi dan anggaran yang direncanakan dapat terserap dengan sebaik-baiknya. karena berdasarkan teori, perencanaan dan penyerapan anggaran yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi; (4) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis, diharapkan

dapat mengembangkan konsep dan perluasan sampel analisis guna mendapat hasil yang lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54-59.
- Delgado, M.S., Henderson, D.J., Parmeter, C.F. (2013). Does Education Matter for Economic Growth?. *Bulletin of Economics and Statistics*. 76 (3). 334-359. DOI : <https://doi.org/10.1111/obes.12025>.
- Djunaidi, D., Alfitri, A. (2022). Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. 8 (1). 29-40. DOI: <https://doi.org/10.29210/020221222>
- Haryanto, T.P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis journal*, 2(3), 2252-6889.
- Jhingan, M. (2014). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones, P. (2001). Are educated workers really more productive?. *Journal Of Development Economics*, 64(1), 57-79.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1-13.
- Laverde-Rojas, H., Correa, J. C., Jaffe, K., & Caicedo, M. I. (2019). Are average years of education losing predictive power for economic growth? An alternative measure through structural equations modeling. *PLoS ONE*, 14(3). e0213651. DOI : <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213651>
- Lemieux, T. (2014). Occupations, fields of study and returns to education. *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique*, 47(4), 1047-1077.
- Maharani, K., & Isnawati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(1).
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Novandy, A. (2015). Pengaruh Belanja Langsung Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Sulawesi Tengah). *Katalogis*, 3(9).
- Pinem, I., Malau, Y. N., & Mardha, F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2017. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 3(2), 201-218.
- Pratini. (2014). Analisis Pendapatan Asli Daerah , Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Kalimantan Barat (Tesis yang tidak dipublikasikan). Universitas Tanjung Pura, Indonesia.
- Raynaldhi, Y. (2016). Pengaruh Faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Saepudin, T. (2013). Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Trikonomika*, 10(2), 148-161.

- Salih, M. A. R. (2012). The Relationship between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from Sudan. *International Business Research*, 5(8), 1913-9004.
- Sari, N., Djuanda, G., & Sarwani, S. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 91-100.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Penganggura: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran, Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, N., Saputra, D. H., Mulyono, S., & Fuadi, Z. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 29-49.
- Todaro, M. P. & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 Edisi Kesembilan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.